

# Prisma

*Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*

Survei:  
Pilkada  
DKI Jakarta 2017

*Mengelola Cagar Budaya,  
Merawat Peradaban*



*LP3ES*



Volume 36, 2017

2







BUKU

# Kebijakan Kebudayaan: Dari Kolonial ke Reformasi

Judul Buku: *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad ke-20 hingga Era Reformasi*

Penulis: Tod Jones

Penerbit: KITLV Jakarta dan Yayasan Pastaka Obor Indonesia, 2015

Tebal: xvi + 356

ISBN: 979 4618 853, 978 9794 61885



Mengawali buku, penulis menyampaikan pada Kata Pengantar bahwa dia pernah dikejutkan oleh akademisi senior Indonesia dalam bidang ekonomi yang bertanya, "Apakah Indonesia memiliki kebijakan budaya?" (hal. x). Jawaban atas pertanyaan tersebut yang paling mudah adalah "memiliki" atau "tidak memiliki." Kemungkinan lain, jawaban kondisional, "memiliki" atau "tidak memiliki tetapi" (...). Akan tetapi, pertanyaan tersebut dapat mengandung satiris untuk menunjukkan bahwa Indonesia tidak memiliki kebijakan budaya yang komprehensif dan prospektif.

Kebudayaan sebagai keseluruhan sistem kehidupan masyarakat terus-menerus dihidupi oleh masyarakat pendukungnya. Sebagai keseluruhan sistem kehidupan, kebudayaan lahir, tumbuh, dan sampai batas waktu tertentu dimungkinkan berakhir digantikan oleh tipe sistem yang lain. Pada praktiknya, dinamika tersebut dapat berlangsung sangat kompleks, rumit, dan unik. Hal itu dikarenakan kebudayaan juga mengalami saling pengaruh, mulai pada tataran lokal, nasional, regional, dan global. Dewantara (1952) mengartikannya sebagai "buah budi" manusia dan karenanya, baik yang bersifat lahir maupun batin, selalu mengandung sifat-sifat keluhuran dan kehalusan atau keindahan, etis dan estelis, yang ada pada hidup manusia pada umumnya. Buku ini merupakan terjemahan dari buku berjudul *Culture, Power, and Authoritarianism in the Indonesian State: Culture Policy across the Twentieth Century to the Reform Era* yang diterbitkan oleh Brill, Leiden, pada 2013.

Disampaikan oleh penulisnya bahwa buku ini ditulis berdasarkan penelitian doktoral yang ditempuh di Curtin University, Perth, Australia (hal. xi). Disertasi sebagai gelar akademik tertinggi lazimnya menyajikan konsep dan teori



baru. Karena itu, pembaca dapat berharap bahwa dengan membaca buku ini akan mendapatkan tawaran konsep berdasarkan temuan yang dilakukan melalui penelitian yang ketat. Buku ini terbagi atas dua bagian. Bagian Satu dengan judul "Sekilas Sejarah tentang Kebijakan Budaya di Indonesia" (terdiri atas lima subbagian) dan Bagian Dua dengan judul "Studi-studi Kasus Kebijakan Budaya" (terdiri atas tiga subbagian).

### Bermula dari Indeks

Indeks buku ini memuat 105 subjek. Dari jumlah tersebut terdapat lima besar mayoritas, yaitu kebudayaan nasional (60); birokrasi (52); kebudayaan daerah (50); demokrasi terpimpin (38); budaya komando (31); dan oposisi (27) (hal. 352-354). Data kuantitatif tersebut berpotensi sebagai salah satu pijakan dalam mencermati kebijakan kebudayaan di Indonesia. Tiga yang pertama menunjukkan bahwa kebijakan kebudayaan nasional dan daerah berkaitan dengan birokrasi sebagai perumus dan pengambil keputusan. Tiga yang terakhir menunjukkan sebagian dari karakteristik budaya yang ada di Indonesia.

Buku ini secara kronologis menyajikan informasi yang utuh mengenai kebijakan kebudayaan di Indonesia. Terhitung sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan Jepang, pemerintahan Indonesia masa Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi. Secara politis, kebijakan budaya di Indonesia sepanjang perjalanan sejarah mengalami represi yang cukup berat. Karena itu, dikatakan bahwa buku ini lebih banyak berbicara mengenai kontrol birokrasi terhadap kebudayaan yang banyak direkayasa untuk sosialisasi dan indoktrinasi. Hal tersebut untuk memperkuat kedudukan rezim yang berkuasa pada masanya.

Masa pemerintahan kolonial Belanda dan pendudukan Jepang, dalam simpulan, dikatakan menampakkan model budaya komando. Selain itu, keduanya juga memperlihatkan kebijakan budaya otoritarian, untuk membenarkan intervensi dan kontrol negara terhadap berbagai

aspek kehidupan "pribumi" sebagaimana terungkap dalam uraian berikut.

### Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Kebijakan yang berpilah pada rakyat Hindia Timur diawali oleh artikel C Th van Deventer berjudul "*A Debt of Honour*" (sebuah utang kehormatan, 1899) kemudian diikuti kebijakan kebudayaan yang dikenal dengan Politik Etis atau politik balas budi melalui program edukasi, irigasi, dan emigrasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi (hal. 47). Walaupun demikian, program tersebut tetap berorientasi pada kepentingan pemerintah kolonial. Pendidikan cenderung berorientasi pada pemenuhan kebutuhan akan tenaga kerja yang diperlukan pemerintah kolonial. Kebijakan budaya untuk orang Eropa di tanah Hindia berupa program pembangunan museum, kajian bidang antropologi, restorasi Candi Borobudur, dan promosi konser musisi dan lukisan Eropa, kesenian pribumi yang dilindungi, teater, dan bioskop. Kebijakan budaya untuk orang Indonesia adalah didirikannya Balai Pustaka (1920) yang diawali dengan berdirinya *Commissie voor de Volkslectuur* (1908). Balai Pustaka dapat dikatakan sebagai produk dua kecenderungan dalam pemerintahan kolonial Belanda, yaitu upaya standarisasi bahasa lokal, Melayu, untuk memudahkan jalannya roda pemerintahan dan sebagai manifestasi kebijakan Politik Etis yang dicanangkan oleh Belanda (hal. 53). Melalui Balai Pustaka, para sastrawan Indonesia dapat menerbitkan karya-karyanya dan dengan ketentuan yang ketat, yaitu apolitis, bermoral, dan bernilai sastra tinggi, sedangkan karya-karya yang diterbitkan di luar Balai Pustaka dikategorikan sebagai "Bacaan Liar."

Pertengahan tahun 1930-an, melalui jurnal sastra *Poedjangga Baroe*, para intelektual nasionalis dan pejuang Indonesia menggeliat dan mengartikulasikan pandangan mereka mengenai kebudayaan Indonesia. Fenomena



tersebut dikenal dengan polemik kebudayaan. Achdiat K Miharja menghimpun semua tulisan tersebut dalam sebuah buku berjudul *Polemik Kebudayaan* yang dicetak pertama kali pada 1948. Hingga masuknya balatentara Jepang pada 1942, *Poedjangga Baroe* mewarnai kehidupan intelektual Indonesia. Polemik kebudayaan mendapat porsi pembahasan yang panjang. Kutub perbedaan terjadi antara pandangan Sutan Takdir Alisjahbana yang berorientasi ke Barat dan Sanusi Pane yang berorientasi ke Timur. Polemik tersebut mengundang tanggapan para intelektual lain, yaitu Poerbatjaraka, Sutomo, Tjindarbuni, Adinegoro, M Amir, dan Ki Hadjar Dewantara.<sup>1</sup>

### Masa Pendudukan Jepang

Jepang menyerang Hindia-Belanda pada 10 Januari 1942 dan Belanda menyerah pada 8 Maret 1942 (hal. 66). Hal itu diikuti peralihan kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Jepang. Kehadiran Jepang pada mulanya menimbulkan kekaguman para intelektual dan pejuang nasional Indonesia, termasuk Soekarno yang menerima janji kemerdekaan dari Jepang dalam sebuah deklarasi yang disampaikan Perdana Menteri Jepang Koiso. Pendudukan Jepang dalam melakukan mobilisasi perang Asia mendapatkan respons positif karena memanfaatkan struktur organisasi yang dipraktikkan oleh penduduk pribumi.

Demikian pula propaganda Jepang menjadikan Asia Timur Raya dengan semboyan Tiga A (Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia). Hal tersebut bertujuan mewujudkan kemakmuran bersama bagi bangsa-bangsa Asia. Kebijakan kebudayaan tampak pada lembaga *Seundenbu* yang merupakan departemen propaganda yang didirikan di Jakarta pada 1942. Lembaga tersebut berkembang dan diikuti pendirian pusat-pusat serta menjadi salah satu ajang kegiatan pejuang

nasionalis Indonesia. Pusat Tenaga Rakyat (Poetera) yang dikenal sebagai organisasi politik didirikan pada 9 Maret 1943 dan dikepalai Soekarno menangani masalah pendidikan, propaganda, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pencerahan (hal. 73). Pusat Kebudayaan (*Keimin Bunka Shidosho*) pada bulan April 1943 yang terdiri dari lima bidang kegiatan, yaitu administrasi, sastra, musik, seni rupa, dan pertunjukan seni (teater, tari, film). Pusat Kebudayaan juga menerbitkan majalah tahunan *Keboedajaan Timoer* dan menempatkan Sanusi Pane sebagai editornya.

Pusat Kebudayaan tersebut, sebagaimana telah dikatakan, bertugas mempromosikan kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Jepang. Lepas dari ketatnya pengawasan dan pengendalian terhadap gerak dan perkembangan pemikiran dan kegiatan kebudayaan Indonesia, kedua pusat tersebut memiliki sumbangan yang signifikan terhadap seni dan budaya Indonesia. Karya para seniman diapresiasi dan para seniman mendapat kesempatan mengikuti berbagai pelatihan. Kebijakan kebudayaan tersebut berdampak pada semakin berkembangnya produksi film, radio, media cetak, seni rupa, teater, musik, wayang, serta bentuk-bentuk seni baru lainnya (hal. 74-75).

### Proklamasi, Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi

Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa politik besar yang sekaligus merupakan pernyataan budaya, yaitu budaya untuk menegakkan *onafhankelijkheid* atau "melepaskan diri dari ketergantungan", tak lagi berlindung dari belas kasihan penjajah, keberanian untuk melepaskan diri dari ketertundukan sebagai *kolonie* di negeri sendiri, menegaskan diri sebagai tuan di negeri sendiri, suatu pernyataan budaya meninggalkan *underdog mentality*nya kaum *inlander*.<sup>2</sup> Semua itu terwujud melalui

<sup>1</sup> Lihat, Achdiat K Miharja, *Polemik Kebudayaan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1977).

<sup>2</sup> Lihat, Sri-Edi Swasono, "Merdeka adalah Pernyataan Budaya", dalam *Kompas*, 28 November 2014.



momen proklamasi yang dikumandangkan oleh dua tokoh besar Indonesia, Soekarno-Hatta. Keduanya melakukan perubahan budaya yang menuntut perubahan sikap mental. Karena itu, revolusi fisik yang telah terjadi perlu diikuti revolusi mental.

Tiga masa pemerintahan pascakemerdekaan dalam banyak sisi masih menunjukkan kebijakan budaya komando dan otoritarian, seperti tampak pada uraian berikut.

## Orde Lama

Pascaperang kemerdekaan, awal masa pemerintahan Republik Indonesia dikatakan sebagai periode formatif. Sebagai negara baru yang menjalankan roda pemerintahan modern, Indonesia belum memiliki pengalaman karena pemerintahan berbentuk kerajaan. Pembahasan bidang kebudayaan pada periode ini pada mulanya masih terfokus pada orientasi dan identitas budaya Indonesia.

Kebijakan budaya antara lain memunculkan kegiatan Kongres Budaya dan Konferensi Budaya. Hatta menyampaikan pandangan kebudayaan sebagai produk dari perjuangan umat manusia untuk mencapai tataran eksistensi yang lebih tinggi dan membagi secara dikotomis kebudayaan material dan spiritual. Dikatakan juga bahwa Barat unggul budaya material, namun tertinggal budaya spiritualnya. Ali Sastroamidjojo memandang perlunya harmoni antara budaya material dan spiritual. Dalam kongres itu, penting dicatat pandangan Ki Hadjar Dewantara yang kemudian diikuti oleh ilmuwan berikutnya. Dia mengatakan bahwa, "Kebudayaan nasional kita ialah segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan daerah di seluruh kepulauan Indonesia, baik yang lama maupun yang baru yang berjiwa nasional".<sup>3</sup> Sedangkan ihwal hubungan negara dengan kebudayaan,

dikatakan bahwa kebudayaan juga memengaruhi sifat pemerintahan suatu negara.

Kongres dan konferensi kebudayaan memunculkan Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) yang kemudian diubah menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia (LKI). Kiprah awal LKI menyelenggarakan Konferensi Budaya Indonesia dengan menampilkan pembicara utama yang pada umumnya mengedepankan gagasan-gagasan yang telah disampaikan sebelumnya mengenai identitas dan orientasi kebudayaan Indonesia. Kongres Kebudayaan kedua berlangsung pada 1952 dan yang ketiga berlangsung di Solo pada 1954. Kongres kedua sudah memunculkan pandangan mengenai perlunya otonomi budaya dan budaya minoritas, pembahasan mengenai unsur-unsur budaya, seperti seni, dan perlunya keberpihakan untuk berkontribusi pada transformasi sosial (hal. 96). Kongres ketiga lebih fokus pada masalah kebudayaan dalam pendidikan. Selain itu, kongres ketiga juga mempromosikan peningkatan intervensi, kontrol, dan kepemimpinan negara.

Kebijakan budaya pada masa Demokrasi Konstitusional menampakkan gejala inovasi yang signifikan untuk pengembangan budaya, seperti dibentuknya divisi seni di Dinas Kebudayaan dan berdirinya perguruan tinggi seni, seperti Akademi Seni Rupa Indonesia (ASRI) dan Konservatori Karawitan Indonesia (KKI). Tiga prinsip utama divisi seni adalah (1) mengembangkan seni secara interdisipliner; (2) mendidik masyarakat dalam bidang seni melalui media massa; dan (3) meningkatkan kemampuan seniman dengan menyediakan beasiswa dan fasilitas lainnya (hal. 102). Berlanjut pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat lembaga kebudayaan yang dominan, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang dibentuk oleh lima belas pekerja budaya pada 17 Agustus 1950. Lekra sejalan dengan pandangan revolusi Soekarno dan mendapat dukungannya. Dalam kiprahnya, Lekra yang berpandangan "seni liberal" berseberangan dengan budayawan yang membuat pernyataan dalam sebuah Manifest Kebudayaan, yang

<sup>3</sup> Lihat, Ki Nayono (Ketua Tim Penerbitan), *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian II Kebudayaan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman-siswa, 1994), hal. 90.



kemudian dikenal dengan Manikebu, yang berpandangan humanisme universal. Lekra yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), diikuti berdirinya lembaga-lembaga kebudayaan yang bernaung di bawah partai, Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), Lembaga Seniman Budayawan Muslim Indonesia (Lesbumi), Lembaga Kebudayaan Kristen Indonesia (Lekrindo), dan Lembaga Kebudayaan Indonesia Katolik (LKIK). Pluralitas budaya masyarakat tersebut menjadi tantangan tersendiri dari negara untuk pengembangannya.

Ruang-ruang budaya tersebut menampilkan kondisi negara yang bineka. Dengan demikian, masa ini menampakkan adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak hidup komunitas budaya mulai dari yang mayoritas hingga yang minoritas. Intervensi negara tampak pada keberpihakan Soekarno pada pandangan-pandangan Lekra.

## Orde Baru

Tumbangya pemerintahan Orde Lama memunculkan pemerintahan Orde Baru sebagai koreksi terhadap pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semangat awal Orde Baru hendak melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tumbangya Orde Lama didukung oleh kaum muda yang tergabung dalam gerakan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Pemerintah Orde Baru dengan sigap membangun tim kerja dalam kabinet yang diberi nama Kabinet Pembangunan. Istilah "pembangunan" mengarah pada yang namanya modernisasi. Untuk keperluan tersebut, Orde Baru mengembangkan program-program pembangunan dengan menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keamanan. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat bagi perkembangan di bidang ekonomi. Karena itu, gerakan, publikasi, dan pertunjukan seni yang diperkirakan akan mengganggu jalannya

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi "dihentikan" dengan berbagai cara.<sup>4</sup>

Bahasan mengenai Orde Baru mendapat porsi besar dalam buku ini. Kebijakan budaya dilakukan dengan memberikan ruang-ruang yang secara formal dalam birokrasi pemerintahan mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Semua dirancang untuk mendukung dan membenarkan ihwal pola hubungan antara rakyat dengan penguasa. Hal itu didukung oleh sistem dan kebijakan politik yang diterapkan, yaitu model komando dan otoritarian. Birokrasi dikendalikan melalui program penganggaran dan penunjukan pejabat. Program yang menyimpang dari garis yang ditentukan oleh pemerintah tidak didanai dan pejabat dipilih yang loyal terhadap pemerintah. Kegiatan budaya dirancang sebagai propaganda pemerintah. Hal tersebut tampak antara lain pada pengangkatan seniman sebagai pegawai negeri di bawah Departemen Penerangan.

Program pembangunan dirancang secara periodik lima tahunan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Negara melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengesahkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai amanat yang harus dilaksanakan oleh Presiden Mandataris MPR. Termasuk di dalamnya dicanangkan ihwal pembangunan dan pengembangan kebudayaan. Program-program yang diusulkan diolah di Bappenas untuk disetujui atau ditolak dengan pertimbangan keterkaitannya dengan Repelita, UUD 1945, dan/atau Pancasila.

Jalinan kerja sama internasional dibangun, termasuk dengan lembaga-lembaga kebudayaan dunia UNESCO yang membantu melakukan restorasi Candi Borobudur awal tahun 1970-an. Duta budaya dilakukan dengan mengirimkan

<sup>4</sup> Pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 2008, WS Rendra sebelum membacakan puisi menyampaikan bahwa pada dua rezim pemerintahan dia menjadi target pengejaran. Pada masa Orde Lama dikejar-kejar Lekra dan pada masa Orde Baru dikejar-kejar tentara.



kontingen kesenian dalam berbagai kegiatan internasional. Selain itu, Jones memberi perhatian pada masalah pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang merupakan praktik "budaya dekorasi" berisi anjungan-anjungan setiap provinsi yang menampilkan budaya fisik mulai dari bentuk bangunan, pakaian adat, dan seni tradisi yang ada di masing-masing provinsi. Taman Budaya dan Dewan Kesenian juga mendapat perhatian dan porsi pembicaraan secara perinci, seperti latar belakang dan aturan-aturannya. Hal itu tertuang dalam Surat Keputusan Mendikbud No 0221/0/1999. Ihwal Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) berpengaruh kuat terhadap kesenian yang ada di daerah-daerah.

Untuk mengukuhkan kekuasaan, Orde Baru menerapkan pembatasan ruang gerak dan pemberangusan melalui rekayasa budaya. Pemberangusan budaya tersebut dalam bentuk pelarangan dan pemusnahan karya penulis yang mendapat stigma komunisme, pelarangan pentas seni, dan penangkapan seniman yang mengkritisi pemerintah. Selain itu, regulasi dalam perizinan juga harus melewati meja birokrasi yang cukup banyak, mulai dari RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kepolisian, Koramil, Dinsospol Kabupaten, dan Dinsospol Provinsi. Semua kegiatan yang melibatkan para guru juga harus mendapat izin Dinas Pendidikan setempat.

Propaganda anti-komunis berhasil dilakukan Orde Baru dengan memanfaatkan agen kebudayaan, termasuk peredaran dan penayangan film *Pengkhianatan G30S/PKI*. Keterpurukan pun dialami orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan dan anggota PKI. Bahkan, sampai dengan tahun 1990-an, ketika ada peneliti yang melakukan wawancara terhadap korban kekerasan dan dituduh sebagai anggota PKI, mereka tidak berani memberi informasi. Mereka cenderung tutup mulut karena dicekam ketakutan.

## Era Reformasi

Gerakan mahasiswa menumbangkan Orde Baru diganti oleh era Reformasi yang mem-

berikan ruang gerak relatif lebih bebas dibandingkan dua pemerintahan sebelumnya. Era reformasi yang diikuti oleh kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi menempatkan budaya etnik sebagai identitas masing-masing etnik. Kebijakan tersebut membuktikan kuatnya pandangan Ki Hadjar Dewantara mengenai budaya nasional sebagai puncak-puncak budaya daerah. Karena itu, budaya Indonesia bersifat bineka. Kebinekaan tersebut sebagai bentuk pengakuan, penghargaan, dan penghormatan atas hak hidup masing-masing budaya termasuk mereka yang minoritas.

Pada era Reformasi, ekspresi budaya lebih terbuka dikembangkan di daerah-daerah dengan menunjukkan ciri khas masing-masing. Terlebih dengan dicanangkannya tahun 2009 sebagai tahun industri kreatif. Berbagai kegiatan budaya berlangsung di daerah-daerah dan mendapat perhatian masyarakat internasional, seperti *Jember Fashion Carnaval*, *Banyuwangi Ethno Carnival*, dan *Batik Carnival Ni Solo*. Di Banyuwangi, misalnya, kebijakan budaya dilakukan secara sistemik dengan menghimpun serpihan-serpihan kegiatan menjadi satu kesatuan dalam kalender *Banyuwangi Festival* dan dapat diakses secara global. Hal tersebut sekaligus sebagai langkah untuk menjembatani dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat global.<sup>3</sup>

Gejala lain, kekerasan budaya berupa pelarangan, sensor, dan kekerasan fisik dan verbal saat ini tidak hanya berasal dari preskripsi penguasa, tetapi juga dari golongan lain. Ancaman bom, *sweeping*, pembredelan, dan penggerebegkan sering kali dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu yang tidak memiliki kewenangan secara yuridis formal, tetapi mengatasnamakan agama atau paham tertentu.

<sup>3</sup> Novi Anoegrajekti, et al., "Perempuan Seni Tradisi dan Pengembangan Model Industri Kreatif Berbasis Seni Pertunjukan", dalam *KARSA*, No.1, Vol. 23, Juni 2015, hal. 91-94.



## Budaya Nasional dan Daerah

Pembicaraan mengenai budaya nasional dan budaya daerah telah mengemuka sejak zaman Poedjangga Baroe. Sebagaimana dikatakan Ki Hadjar Dewantara, "Kebudayaan nasional kita ialah segala puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan daerah di seluruh kepulauan Indonesia, baik yang lama maupun yang baru yang berjiwa nasional." Hal tersebut disanggah Sanusi Pane yang menyatakan bahwa generasi saat itu menghendaki budaya tunggal Indonesia dan bukan serpihan-serpihan yang berarti kembali ke etnik masing-masing. Pandangan Ki Hadjar Dewantara tampak lebih mendasar dan realistis karena secara faktual kebudayaan Indonesia sebagai konsep imajinatif. Budaya yang riil adalah Aceh, Batak, Jawa, Sunda, Madura, Papua, dan lain-lain.

Selain itu, sudah dipikirkan pula kecenderungan budaya internasional atau global. Pada waktu itu Sutan Takdir Alisjahbana membedakan tiga orientasi budaya, yaitu Prae-Indonesia, Indonesia, dan Pasca-Indonesia. Ki Hadjar Dewantara menyebutnya dengan warga etnis yang tertentu (Fase Kesukuan), warga Indonesia (Fase Ke-Indonesiaan), dan warga dunia (Fase Keinternasionalan). Sedangkan YB Mangunwijaya menggunakan istilah pranasional, nasional, dan pascanasional.<sup>6</sup>

## Polarisasi Bahasa dan Kekerasan Verbal

Satu hal yang perlu mendapat perhatian serius dari penulis adalah ihwal bahasa. Hal tersebut berkaitan dengan munculnya kesadaran kebangsaan dari kalangan intelektual Indonesia

yang mendapat pendidikan Barat, yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo. Bersamaan dengan hal tersebut terbit sejumlah majalah dalam bahasa Melayu yang merupakan asal dari bahasa Indonesia. Sebagian tokoh yang berkecimpung dalam bidang pendidikan memandang perlunya penggunaan bahasa setempat. Karena itu, ada upaya agar salah satu bahasa di Hindia-Belanda digunakan sebagai bahasa pengantar di lingkungan lembaga pendidikan. Ki Hadjar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan yang berjuang untuk keperluan tersebut. Hal itu dikatakan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam salah satu artikelnya berjudul "Hanya Bahasa Indonesia Berhak Menjadi Bahasa Persatuan: Di Sampingnya Masih Terpelihara Bahasa-bahasa Daerah yang Kuat." Beliau telah berjuang untuk dapat menggunakan salah satu bahasa di Tanah Hindia pada "Eerste Koloniaal Onderwijs-Congres" di Belanda, 28 Agustus 1916.<sup>7</sup>

Upaya standardisasi bahasa lokal yang dikemukakan di atas terjadi melalui pemberlakuan ejaan van Ophuijsen (Ch A van Ophuijsen), dalam buku *Kitab Logat Melajoe* (1901), ejaan Latin resmi pertama di Indonesia (penyusun lainnya: Engku Nawawi, St Makmur, M Taib St Ibrahim). Hal itu untuk memudahkan pemerintah kolonial Hindia-Belanda menjalankan roda pemerintahan dan komando kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Hal senada terjadi pada masa Orde Baru dengan dirumuskannya "Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan." Lembaga yang bertugas menangani bahasa saat itu adalah Pusat Bahasa yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bahasa perlu perhatian besar karena merupakan satu-satunya media yang berpotensi sebagai penyimpan paling komprehensif.

Bahasa seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, bahasa bermanfaat untuk hal-hal yang konstruktif. Di sisi lain, berpotensi untuk mela-

<sup>6</sup> Mihadja, *Polemik Kebudayaan*, hal. 13-21; Ki Noyono, *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian II Kebudayaan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1994), hal. 88-92. Moch Tauchid (Ketua Panitia Penerbitan), *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2004), hal. 495-497.

<sup>7</sup> Lihat Moch. Tauchid (Ketua Panitia Penerbitan), *Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama Pendidikan* (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 2004), hlm. 514.



kukan hal-hal yang destruktif. Pembunuhan karakter sebagian dilakukan secara verbal dengan menciptakan idiom-idiom sebagai senjata pamungkas yang mematikan. Stigma *ekstrem kiri, terlibat, tidak bersih lingkungan*, dan KTP bertanda "OT" dikenakan pada orang-orang yang dituduh simpatisan dan anggota PKI. Stigma *ekstrem kanan, ortodoks, garis keras*, dan *fundamentalis* dikenakan pada ulama dan tokoh agama yang mengkritisi dan melakukan kritik terhadap pemerintah. Stigma *subversi* dikenakan kepada orang yang melakukan kejahatan terhadap negara. Idiom tersebut muncul setelah peristiwa Malari yang dipimpin oleh Hariman Siregar. Stigma *aktor intelektual* dikenakan kepada intelektual dan akademisi yang mengkritisi dan melakukan kritik serta gerakan yang dipandang mengancam pemerintah. Yang berikutnya stigma *teroris* dikenakan pada orang yang melakukan kekerasan, mengancam, menakut-nakuti, dan merusak fasilitas.

Kebijakan kebahasaan yang lain tampak pada upaya mewujudkan pengembangan leksikon, tata bahasa, ejaan, dan pendokumentasian bahasa-bahasa daerah yang ada di seluruh Nusantara. Ratusan bahasa yang ada di Indonesia telah diteliti kosakata dan tata bahasanya, meski belum mendalam dan menyeluruh. Pengembangan leksikon ditampung dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang diluncurkan kali pertama pada Kongres Bahasa Indonesia tahun 1988, bersamaan dengan buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* dan buku *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jauh sebelum itu, sejak tahun 1975 telah diformulasikan *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*.

## Penutup

Uraian pada bab-bab terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan kebudayaan Indonesia dari zaman pemerintahan kolonial Hindia-Belanda hingga zaman Orde Baru menunjukkan kecenderungan serupa, yaitu bersifat komando dan otoritarian. Konsep kebudayaan cenderung dipersi-persi sesuai dengan tujuan dan kepentingan

penguasa. Karena itu, kegiatan budaya cenderung sebagai media propaganda, sosialisasi, dan memaksakan kehendak kepada rakyat.

Kekerasan budaya yang dilakukan oleh penguasa melalui aparatusnya dialami oleh komunitas-komunitas budaya dan individu yang melakukan perlawanan dan mengkritisi pemerintahan yang sedang berkuasa. Kekerasan verbal pada masa kolonial dengan menyebut karya sastra di luar Balai Pustaka sebagai *Bacaan Liar*. Pada masa pendudukan Jepang, muncul istilah *sastra tersimpan* sebagai lawan dari *sastra tersiar*.

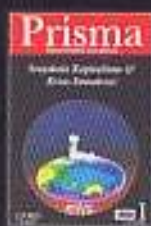
Proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan sekaligus merupakan pernyataan budaya, yaitu budaya melepaskan diri dari ketergantungan, tidak berlindung pada belas kasih penjajah, melepaskan diri dari ketertundukan sebagai *kolite* di negeri sendiri, menegaskan diri sebagai tuan di negeri sendiri, dan pernyataan meninggalkan *underdog mentality*-nya kaum *inlander*. Namun, pada masa Orde Lama sastrawan dan budayawan yang berseberangan dengan pemerintah disebut kelompok Manikebu. Sedangkan pada masa Orde Baru lebih banyak idiom yang muncul untuk membunuh karakter komunitas yang berseberangan dengan pemerintah, seperti *terlibat, tidak bersih lingkungan, ekstrem kiri, ekstrem kanan, fundamentalis, ortodoks, garis keras, subversif, aktor intelektual*, dan *teroris*. Kekerasan lain pada masa itu berupa pelarangan dan pemusnahan buku, pelarangan pentas, pembredelan media massa, dan penangkapan tokoh-tokoh yang tidak sejalan dengan pandangan pemerintah.

Pada era Reformasi yang diikuti otonomi daerah dan desentralisasi dalam berbagai bidang kehidupan memberi peluang daerah untuk mengartikulasikan identitas etnik dan budaya. Walaupun demikian, kekerasan budaya masih berlangsung dalam bentuk ancaman, pembubaran forum pertemuan, perusakan fasilitas, dan teror. Semua itu dilakukan oleh komunitas masyarakat terhadap komunitas lainnya yang berbeda pandangan dan ideologi•

Novi Anoegrajekti



*Prisma*, sebuah bacaan ilmiah populer untuk komunitas intelektual, mahasiswa, akademikus, penentu kebijakan di pemerintahan maupun dunia usaha. *Prisma* berisi pemikiran-pemikiran alternatif, ringkasan hasil penelitian, survei, hipotesis atau gagasan orisinal yang kritis dan segar tentang masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya.



### Senjakala Kapitalisme dan Krisis Demokrasi

Prisma Volume 28, Nomor 1, Juni 2009:

*Vedl R Hadiz* menuntut pengurangan/pembatalan sebagian utang luar negeri  
*Sri Mulyani Indrawati* mencari keseimbangan peran negara dan pasar  
*Daniel Dhakidae* menyoal partai politik di persimpangan jalan



### Islam dan Dunia

Prisma Volume 29, Nomor 4, Oktober 2010:

*Noorhaidi Hasan* mencari solusi mengatasi radikalisme,  
*Azyumardi Azra* mengglobalkan Islam Indonesia.  
*Musdah Mulia* menjadikan agama sebagai landasan etis, bukan politis.



### Kelas Menengah Indonesia: Apa yang Baru?

Prisma Volume 31, Nomor 1, 2012

*Francisia SSE Seda* menelusuri kelas menengah Indonesia  
*Ninuk Mardiana P* mempertanyakan gaya hidup suka mengonsumsi dan meniru  
*Indera Ratna Irawati Pattinasarany* mengupas mobilitas sosial kelas menengah



### Demokrasi di Bawah Cengkeraman Oligarki

Prisma Volume 33, Nomor 1, 2014

*Jeffrey A Winters* menautkan oligarki dan demokrasi di Indonesia  
*Thomas B Papinsky* membedah pluralisme dan perseteruan politik  
*Edward Aspinall* menyinggung peran agensi dan kepentingan massa  
*A Rahman Tolleng* menelisik oligark hitam dan revolusi dari atas



### Pembangunan Berkelanjutan dan Perubahan Iklim

Prisma Volume 35, Nomor 2, 2015

*Ismid Hadad* menggapai tujuan pembangunan pasca-2015  
*Suzanty Sitorus* menyusun strategi pendanaan pembangunan berkelanjutan  
*Harry Seldadyo Gunardi* menelusuri tujuan pembangunan berkelanjutan

---

LP3ES

Jl. Pangkalan Jati 1 No.71, Pondok Labu-Cinere, Depok 16513  
Telp. (6221) 27654031, Faks. (6221) 27654031  
Email: [prisma@prismaresource.com](mailto:prisma@prismaresource.com); [prisma.redaksi@gmail.com](mailto:prisma.redaksi@gmail.com)

ISSN 0301-6269